

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.6 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, tergolong salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Sebagai Negara kepulauan, berbagai bentuk masalah muncul akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk dapat segera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan.

Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran tidak merata disertai rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Sama halnya dengan persebaran penduduk di Kabupaten Merangin dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 343.003 jiwa yang terdiri dari 176.800 jiwa Laki-Laki dan 162.203 Jiwa Perempuan.

Persebaran Penduduk tidak Merata mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan-permasalahan baru di bidang kependudukan diantaranya kemiskinan, kesehatan, pengangguran. Keselarasan jumlah penduduk yang besar akan menuntut adanya keselarasan terhadap segi kualitas sumber daya manusianya. Kemudian akan timbul permasalahan-permasalahan menyangkut penduduk di sebuah Negara apabila terjadi ketimpangan nyata antara jumlah penduduk yang besar dengan dukungan sumber daya manusia relatif rendah.

Berkaitan dengan berbagai masalah kependudukan, Pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia untuk membuat pemetaan

yang tepat, guna menanggulangi masalah kependudukan tersebut. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan sesuai dengan berbagai standar, diperlukan yaitu pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dibuat sekitar tahun 1996.<sup>1</sup> SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya.<sup>2</sup> SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada kecamatan atau kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi karena pelaksanaannya di lapangan ternyata didapati berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan. Masih terdapat pemalsuan identitas karena kurang detailnya data mengenai penduduk. Selain itu

---

<sup>1</sup> Dinas Kependudukan dan catatan sipil 1996. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK).

<sup>2</sup> <http://kamerad69.blogspot.com/2010/02/pengertian-simdik-berbasis-web.html>

dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama.

Berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Berkenaan dengan hal tersebut untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan *database* penduduk.<sup>3</sup> Pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan *database* penduduk, tetapi sekaligus memberi Nomor Induk bagi setiap penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, Pemerintah Pusat dalam hal ini telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan” atau disingkat SIAK.

Secara hukum sistem ini sudah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah

---

<sup>3</sup> Wawancara di Dukcapil Kabupaten Merangin Tahun 2021.

khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.<sup>4</sup>

SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat memberikan manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Hasil observasi lapangan, Kabupaten Merangin mulai menerapkan SIAK dari tahun 2016, dan sudah menghasilkan database kependudukan untuk Kabupaten Merangin. *Database* kependudukan dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kabupaten Merangin, dan menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi Pemerintah Kabupaten Merangin.

Penerapan SIAK diharapkan memudahkan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya efektivitas organisasi. Dalam pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akte kelahiran bisa selesai dalam waktu 2 sampai 3 hari saja. Tapi pada kenyataannya dalam pengurusannya melebihi dari target waktu yang sudah ditentukan dengan berbagai alasan, seharusnya dengan diterapkannya SIAK masyarakat tidak perlu menunggu lama, karena sistem ini sudah berbasis online. Seperti wawancara singkat dengan ardi salah seorang warga yang sedang mengurus Kartu Tanda Penduduk, mengaku

---

<sup>4</sup> Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

harus menunggu beberapa hari.<sup>5</sup> Tidak hanya di Merangin di Kabupaten lain seperti di Sarolangun terjadi hal yang sama SIAK yang diterapkan Dukcapil belum efektif, Oleh sebab itu efektivitas penerapan SIAK ini sendiri belum terlaksana dengan baik seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Data Penduduk Merangin Tahun 2016 sampai 2020**

No	Kategori						
	Tahun	Jumlah	Wajib KTP	Sudah Rekam	%	Belum	%
1	2016	372.205	228.431	196.387	85,98	32.044	14,02
2	2017	377.905	232.755	204.541	87,88	28.214	12,12
3	2018	383.480	232.083	227.213	95,34	10.837	4,66
4	2019	388.928	299.654	201.568	95,1	19.086	4,90
5	2020	394.174	375.231	326.589	87,06	48.589	12,94

Sumber: *Dukcapil Kab. Merangin*<sup>6</sup>

Penerapan SIAK dari tahun 2016 sampai 2020 belum efektif terlihat dari jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP dari 24 kecamatan sebanyak 48.589 jiwa. Realisasi pada tahun 2021 Penduduk yang belum melakukan perekaman agar melakukan Perekaman E-KTP. Jika dibandingkan dengan kabupaten Batanghari, pada tahun 2018 saja dengan jumlah Penduduk 303.032, wajib e-KTP 211.202 dan telah terealisasi perekaman berjumlah 187.219 jiwa. Kemudian penduduk yang belum melakukan perekaman hanya 377 jiwa. Artinya kesadaran penduduk akan identitas penduduk sangat tinggi di kabupaten Batang Hari dan SIAK disana sudah berjalan dengan efektif. Sementara di Merangin Dukcapil masih terus berbenah untuk mencapai target perekaman sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang telah ditetapkan.

<sup>5</sup> Wawancara. Ardi . Masyarakat tahun 2021.

<sup>6</sup> Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin. 2021.

Sosialisasi yang kurang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) daerah, kurangnya pelayanan dari jajaran Dukcapil daerah dalam mengakomodasi pelayanan perekaman data, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan perekaman E- KTP. Heru (19) warga Koto Renah Kecamatan Jangkat mengaku malas membuat e-KTP, karena melihat proses pembuatan yang berbelit-belit.<sup>7</sup> Selain itu memakan waktu yang panjang. Waktu itu membuat e-KTP harus ada surat pengantar RT RW, kemudian mengurus dulu ke kantor Kelurahan, baru bisa merekam identitas di Kecamatan, Sudah capek-capek ngantre dan buat e-KTP tahunya belum bisa dicetak. Kecamatan jangkat merupakan jumlah penduduk paling sedikit dibanding kecamatan lainnya, dengan demikian peneliti memilih kecamatan Jangkat. Untuk rincian data per kecamatan data terlampir (Lampiran 1).

**Tabel. 1.2 Data Kecamatan Jangkat Merangin Tahun 2016 sampai 2020**

No	Kategori						
	Tahun	Jumlah	Wajib KTP	Sudah Rekam	%	Belum	%
1	2016	8.918	6.345	5.004	78,87	1.341	21,13
2	2017	8.749	6.420	5230	81,47	1.190	18,53
3	2018	9.890	6.632	5342	86,96	1.290	13,04
4	2019	9.409	6.820	5530	81,09	1.290	18,91
5	2020	9.420	7.008	6002	85,65	1.006	14,35

Sumber: *Dukcapil Kab. Merangin*<sup>8</sup>

Data di atas merupakan salah satu kecamatan secara keseluruhan jumlah penduduk paling sedikit dibanding Kecamatan yang lain, tahun 2016 sampai 2020 terlihat masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman E-KTP sebanyak 1.006 orang, jarak tempuh dari kecamatan ke kabupaten memerlukan waktu cukup lama sehingga masyarakat belum melakukan perekaman E-KTP dengan waktu

<sup>7</sup> Wawancara Heru masyarakat Desa Koto Renah Kecamatan Jangkat.

<sup>8</sup> Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin. 2021.

yang ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin, dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari karena SIAK belum maksimal dilaksanakan. Seharusnya dukcapil memberikan solusi agar masyarakat bisa melakukan perekaman E-KTP tanpa harus ke dukcapil langsung dengan turun langsung ke kecamatan, dengan demikian masyarakat tidak perlu lagi ke dukcapil untuk melakukan perekaman E-KTP dan menunggu terlalu lama. Harapan masyarakat agar setiap kecamatan mempunyai alat untuk SIAK, tujuannya masyarakat agar tidak ada lagi yang belum mempunyai KK, KTP ataupun AKTE. Kemudian masyarakat tidak merasa kesulitan dalam mengurus KK, KTP ataupun Akte karena bisa di urus langsung di kecamatan.

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam proses penyusunan proposal penelitian antara lain, Penelitian yang di lakukan oleh Haeny Salfian, dengan judul Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2019.<sup>9</sup> Secara umum Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram diukur menggunakan pendekatan proses yang meliputi sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana sudah cukup efektif. Namun, masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui mengenai SIAK yang sudah berbasis online.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Haeny Salfian, dengan judul Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2019.

<sup>10</sup> Haeny Salfian (2019), *Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan pendekatan proses yang meliputi sumber daya manusia, data kependudukan, sarana dan prasarana sudah berjalan efektif. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan proses tentang Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin belum sepenuhnya efektif. Sementara itu, persamaan penelitian sama-sama membahas tentang Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), terutama hambatan dan upaya Dukcapil dalam meningkatkan efektifitas SIAK.

Selanjutnya penelitian kedua oleh Alwin Auliarachman, judul Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin).<sup>11</sup> Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara umum penerapan SIAK pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banjarmasin sudah efektif. Berdasarkan empat indikator yang digunakan yaitu kejelasan tujuan penerapan SIAK yang dirumuskan sudah jelas, korelasi antara input dan output sudah memadai walaupun terdapat beberapa hambatan, keterkaitan antara input, output dan proses dilihat dari capaian presentase cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang termasuk kategori berhasil, kemudahan dalam menentukan kriteria

---

<sup>11</sup> Alwin Auliarachman, judul Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin).

yaitu adanya beberapa penghargaan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang sudah cukup baik.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu penerapan SIAK pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banjarmasin sudah efektif sedangkan penelitian yang penulis lakukan penerapan SIAK belum efektif. Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Alasan peneliti mengambil judul ini karena ingin mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin dalam meningkatkan efektivitas SIAK. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini berjudul **“Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa hambatan dan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk meningkatkan efektivitas SIAK dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk?

---

<sup>12</sup> Alwin Auliarachman(2019)*Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin)*.Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB.

2. Bagaimana efektivitas SIAK dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk meningkatkan efektivitas SIAK dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk.
2. Untuk mengetahui efektivitas SIAK dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Teoritis**

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang di dapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin.

#### **2. Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan efektivitas, sehingga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam diterapkan dengan baik.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1. Konsep Efektivitas**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Jika dilihat dari asal katanya, efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus Ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.<sup>13</sup>

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

---

<sup>13</sup> Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Andi Offset. Yogyakarta. hal 37.

Selanjutnya pengertian efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi”.<sup>14</sup> Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut berjalan secara efektif. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Jadi efektivitas merupakan suatu keberhasilan yang dihasilkan seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

#### b. Tujuan Efektivitas

##### Tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengelolaan SIAK bertujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2) Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- 3) Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

---

<sup>14</sup> The Liang Gie.1998.*Ensiklopedia Administrasi*. Bandung: Rineka Cipta. hal 147.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi ia adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang. Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif, dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya;
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.<sup>15</sup>

#### c. Indikator Efektivitas

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan yang dapat digunakan dalam mengukur keefektifan organisasi antara: mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan pendekatan sistem.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui efektivitas suatu program, perlu dilakukan penilaian terhadap manfaat atau daya guna program tersebut. Ada tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Martini dan Lubis. 2013. *Teori Organisasi*. Bandung: Chalia Indonesia. Hal 45.

<sup>16</sup> Gibson, Donnely dan Ivancevich 2011. *Mengukur efektivitas*. Bandung: Rineka Cipta. hal 67.

<sup>17</sup> Martini dan Lubis. 1907. *Teori Organisasi*. Bandung: Chalia Indonesia. hal 45.

### 1) Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan sumber mencoba mengukur efektivitas dari sisi input dan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik.

### 2) Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif proses internal berjalan dengan lancar, karyawan bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing bagian terkoordinasi secara baik dengan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi.

### 3) Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Pendekatan sasaran dalam mengukur efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang paling penting dalam pengukuran efektivitas adalah sasaran yang sebenarnya karena akan memberikan hasil yang lebih realistis dari pada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan seperti; (a) adanya berbagai output; (b) adanya subyektivitas dalam penilaian; (c) pengaruh konstektual lingkungan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sondang P. Siagian. 2010. *Manajemen Modern*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

#### d. Komponen SIAK

Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 3 komponen diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Pendaftaran Penduduk

Sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan Nomor Penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, dan KTP.

##### 2) Pencatatan Sipil

Merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu dilegalisir oleh negara melalui penerbitan dokumen yang sah menurut hukum dalam bentuk akta catatan sipil. Beberapa peristiwa penting yang harus dilaporkan diantaranya: Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian.

##### 3) Pengelolaan Informasi Kependudukan

Pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui suatu media atau alat yang akan menjadikannya sebagai informasi tentang perkembangan penduduk dari waktu ke waktu. Karena outputnya informasi, maka komponen ini sering disebut juga sebagai pengelolaan informasi.

#### Elemen-Elemen Sistem Informasi Manajemen

Adapun elemen-elemen Sistem Informasi Manajemen yaitu sebagai berikut:

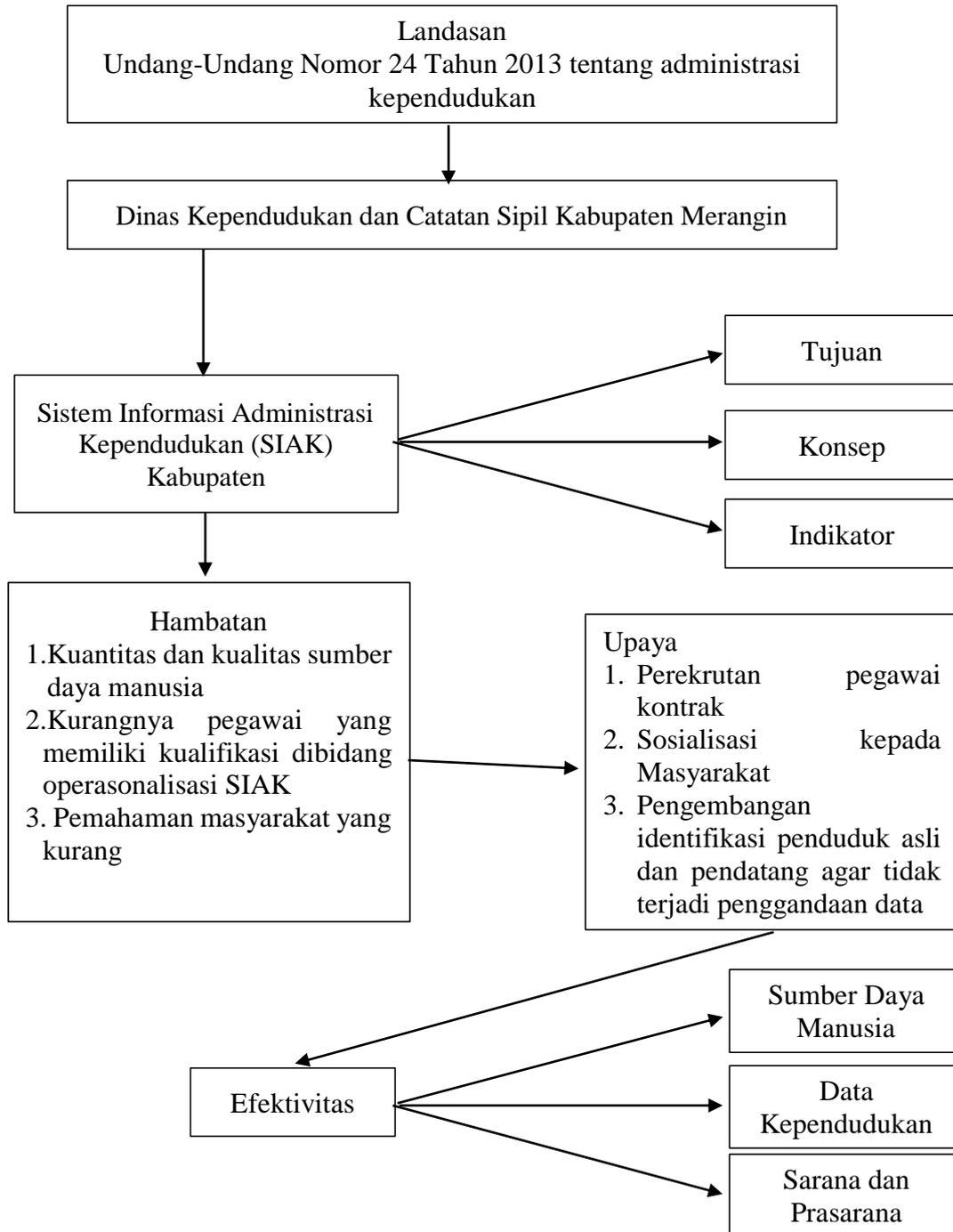
1. *Hardware*, terdiri dari computer, peripheral (printer) dan jaringan.
2. *Software*, merupakan kumpulan dan perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan computer melaksanakan tugas tertentu.

3. *Data*, merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi.
4. *Manusia*, yang terlibat dalam komponen manusia seperti operator, pemimpin sistem informasi dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu suatu rincian tugas yang jelas.
5. *Prosedur*, seperti dokumentasi prosedur/ proses sistem, buku penuntun operasional (aplikasi) dan teknis.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan

## 1.6 Kerangka Penelitian



**Gambar 1.1 Kerangka Penelitian**

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang dipakai oleh peneliti untuk mengatasi masalah dilapangan saat melakukan penelitian. Sehingga, dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsistensi antara metode yang dipakai dengan teknik operasional dalam mencari data penelitian, instrument dan analisis data. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian digunakan untuk memperoleh suatu data. Penelitian kualitatif adalah pendekatan dengan cara memandang objek kajian sebagai suatu sistem, artinya objek kajian dilihat sebagai suatu yang terdiri dari unsur yang saling berkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.<sup>20</sup>

### **2. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Januari 2022. Alasan peneliti mengambil judul ini karena ingin mengetahui Efektivitas, hambatan dan upaya yang dilakukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pengurusan kartu Tanda Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin.

---

<sup>20</sup> Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

## b. Jenis Data

### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung.

### 2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, data berupa dokumen-dokumen, internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sugiono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee)” yaitu kepala Dinas, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi, Kepala Seksi SIAK, dan Masyarakat. Pelaksanaan wawancara dilakukan selama penelitian berlangsung yaitu dengan menggunakan metode wawancara terbuka.<sup>22</sup>

#### **4. Teknik Pengambilan Informan**

Informan penelitian berisi tentang jenis data informan penelitian (sumber data), teknik informan dengan menggunakan teknik Purposive sampling. karena Purposive sampling salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian<sup>23</sup> (Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti).

Penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

- a. Informan kunci adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti yaitu operator SIAK

---

<sup>22</sup> Sudjana, Nana. 2013. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

<sup>23</sup> Margono, 2010. *Metode penelitian pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. hal.27.

- b. Responden yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin yaitu Bapak Jailani, S.Sos selaku Kepala Dinas, Bapak Jonizen, SE., M.Ak., AKT selaku Sekretaris, Bapak Bambang Sumarman, S.Sos selaku Kepala Seksi SIAK dan Masyarakat.

## **5. Metode Analisa Data**

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif, data tersebut akan di analisis dan disajikan dalam bentuk tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun literature untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

Menurut miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif, bahwa aktivitas dalam analisis data deskriptif melalui tiga cara yaitu:

### **a. Reduksi data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data memfokuskan pada hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengolah data yang diperoleh dilapangan.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data yang digunakan untuk penelitian kualitatif adalah teks yang berbentuk deskriptif.

Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan, dan merupakan kegiatan pengungkapan akhir dari hasil penelitian masih perlu diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kesesuaian makna-makna yang muncul dari data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat kepercayaan tinggi. Verifikasi data dilakukan pada setiap tindakan yang pada akhirnya dipadukan menjadi kesimpulan.

## **6. Keabsahan Data/Triangulasi**

Menurut Lexy J. Moleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data. Salah satunya menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Ed. Rev., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2010), hlm. 330

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang terkumpul, memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan kembali sebagai pembanding data, sehingga data yang digunakan ini terbukti keabsahannya.